

**PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
TINGKATKEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB KONVERGENSI IFRS
PADAPERUSAHAAN HOTEL, RESTORAN DAN PARIWISATA YANG
TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2018**

Diska Asmarni¹⁾ Irni Yusnita²⁾

^{1,2)} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sumatera Barat

Email : diskaasmarni@yahoo.com¹⁾

irniyusnita440@gmail.com²⁾

Abstract

The purpose of the this research is to test the influence the mechanism of corporate governance to the level of mandatory disclosure compliance convergence of IFRS. The mechanism of corporate governance is measured by the number of board commissioner meetings, the proportion of independent commissioners, the number of members of board commissioners, the number of audit committees, the number of audit committee meetings and managerial ownership. The sampling method used in this research is a purposive sampling method and obtained a sample of 10 companies from 2014-2018. The results of this showed that the number of members of board commissioner and managerial ownership have significantly influence to the level of mandatory disclosure compliance convergence of IFRS. The number of board commissioner meetings, the proportion of independent commissioners, the number of audit committees, and the number of audit committee meetings does not significantly influence to the level of mandatory disclosure compliance convergence of IFRS.

Keywords: *The mechanism of corporate governance, number of board commissioner meetings, proportion of independent commissioners, number of members of board commissioners, number of audit committees, number of audit committee meetings, managerial ownership and mandatory disclosure convergence of IFRS.*

I. PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan kegiatan perekonomian dunia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sehingga menuntut adanya sistem akuntansi yang terstandar secara internasional yang dapat diberlakukan secara internasional di setiap negara. Menurut Deloitte (2019), sejak April 2019 tercatat sudah 175 negara yang telah mengadopsi IFRS termasuk Indonesia. Dengan adanya pengadopsian IFRS perusahaan-perusahaan di Indonesia diharapkan dapat bersaing di dunia internasional. Dengan demikian, untuk dapat bersaing di dunia internasional perusahaan harus lebih transparan dalam mengungkapkan laporan keuangan yang membantu para pengambil keputusan dalam keputusan investasi.

Di Indonesia yang menjadi otoritas pengungkapan wajib adalah Otoritas Jasa Keuangan. Setiap perusahaan publik diwajibkan membuat laporan keuangan yang di audit oleh akuntan publik sebagai sarana pertanggungjawaban terutama kepada pemilik modal.

Pengungkapan wajib merupakan penyampaian informasi yang diharuskan sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK Nomor : KEP-347/BL/2012. Namun penerapan peraturan tersebut nyatanya belum mampu menjamin terlaksananya praktek pengungkapan yang lebih tinggi. Dengan demikian, untuk menerapkan terlaksananya pengungkapan tersebut maka diperlukan pengawasan dari mekanisme *corporate governance* yaitu dewan komisaris dan termasuk komite audit yang berada dibawah dewan komisaris serta kepemilikan manajerial untuk mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam perusahaan. Dengan adanya mekanisme *corporate governance* diharapkan perusahaan mampu menerapkan fungsi dari *corporate governance* yang lebih efektif agar dapat memberikan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS yang lebih tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS pada perusahaan hotel, restoran dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Mekanisme *corporate governance* diukur dengan jumlah rapat dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah anggota dewan komisaris, jumlah komite audit, jumlah rapat komite audit dan kepemilikan manajerial.

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance* dan pengungkapan wajib. Di dalam suatu perusahaan sering kali mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada pihak lain, dalam hal ini perusahaan atas nama *principal* dan pihak lain sebagai *agent*. Manajemen, sebagai *agent* atau pihak yang diberi wewenang untuk menjalankan dana dari pemilik atau *principal*, harus mempertanggungjawabkan semua keputusan yang diambilnya kepada *principal*. Antara *principal* dan manajer mempunyai tujuan yang berbeda, *principal* lebih mementingkan keuntungan pribadi sedangkan manajer lebih mementingkan kesejahteraannya sendiri. Perbedaan persepsi antara *principal* dan *agent* (manajer) inilah akan menimbulkan asimetri informasi. Manajer yang lebih cenderung mengetahui keadaan perusahaan mempunyai peluang besar untuk melakukan tindakan yang tidak menguntungkan pemilik dalam pelaporan keuangannya. Oleh karena itu perlu adanya tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut dengan *Good Corporate Governance* sebagai bentuk pengawasan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dilaporkan kepada *principal* haruslah mencerminkan nilai-nilai akuntansi yang sesuai dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) dan melakukan pembaruan sesuai dengan perkembangan, yaitu dengan konvergensi IFRS (Widjayanti dan Wahidawati, 2015).

Teori *Stakeholders*

Teori *stakeholders* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholders*-nya atau masyarakat yang luas seperti (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu

perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan *stakeholders* kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007).

Teori *stakeholder* memiliki suatu hubungan dengan *GoodCorporate Governance* dimana *stakeholder* sebagai pihak yang memengaruhi dan/atau dipengaruhi dalam pengelolaan perusahaan serta pencapaian tujuan perusahaan. Perusahaan harus selalu melibatkan *stakeholder* dalam setiap kebijakan maupun pengambilan keputusan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan harus melaksanakan *Good Corporate Governance* yang berperan untuk mengungkapkan (*disclosure*) semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan (Sulasmiyati, dkk., 2016).

Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS

Pengungkapan (*Disclosure*) adalah mengkomunikasikan mengenai posisi dari keuangan dengan tidak menyembunyikan informasi, apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, *disclosure* mengandung makna bahwa laporan keuangan yang harus memberikan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha kondisi keuangan perusahaan kepada para pengguna laporan keuangan (Rini, 2010). Menurut Suhardjanto (2012) terdapat dua sifat pengungkapan, yaitu pengungkapan yang didasarkan pada ketentuan (*required/regulated mandatory disclosure*) dan pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku (Suwardjono, 2005). Pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang bersifat wajib meliputi pengungkapan yang didasarkan atas ketentuan/standar yang berlaku yang harus dipatuhi oleh setiap perusahaan yang disyaratkan.

Konvergensi IFRS merupakan proses menyesuaikan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dengan Standar Akuntansi yang berlaku secara Internasional (IFRS). Pengungkapan wajib laporan keuangan telah diatur standar akuntansi internasional IFRS. Pengungkapan wajib dalam laporan tahunan perusahaan telah diatur dan ditetapkan oleh standar akuntansi internasional IFRS. Tujuan penerapan IFRS adalah untuk menyelaraskan standar akuntansi yang dipakai disuatu negara dengan IFRS untuk memperkecil perbedaan diantara keduanya.

Mekanisme Corporate Governance

Mekanisme *corporate governance* merupakan aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan baik yang melakukan kontrol/pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *corporate governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi (Walsh dan Seward, 1990).

Menurut Lins dan Warnock (2004) mekanismecorporate *governance* dibagi menjadi dua yaitu mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Dari kedua mekanisme tersebut, mekanisme internal *corporate governance* merupakan cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal. Internal mekanisme diprosikan dengan jumlah komite audit, jumlah rapat komite audit, jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, serta kepemilikan manajerial.

Sedangkan eksternal mekanisme merupakan cara mempengaruhi perusahaan selain dengan internal mekanisme, yang diproksikan dengan kepemilikan institusional.

Pengembangan Hipotesis

Jumlah Rapat Dewan Komisaris Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS

Peran dewan komisaris berfungsi memonitoring keputusan manajemen. Intensitas kuantiti rapat yang dihadiri para dewan komisaris diharapkan memberikan keputusan yang transparan untuk pengungkapan wajib IFRS. Berdasarkan teori agensi, agen harus mampu memberikan keyakinan kepada investor, bahwa agen tidak akan menyalahgunakan dana yang telah diinvestasikan oleh investor. Oleh karena itu, agar manajemen dapat memberi keyakinan kepada investor maka diperlukan pertemuan rutin dewan komisaris. Hal ini dilakukan agar dewan komisaris dapat terus memantau kinerja manajemen untuk melakukan pengungkapan secara luas dalam laporan keuangan untuk memberikan transparansi informasi terhadap investor. Semakin banyak jumlah rapat dewan komisaris akan memudahkan untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam melaksanakan strategi dan kebijakan perusahaan.

Hasil penelitian Sutiyok dan Rahmawati (2014) menemukan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS. Sedangkan Pitasari dan Septiani (2014) menyatakan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah :

H1: Diduga jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

Proporsi Komisaris Independen Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS

Semakin besarnya proporsi komisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan dewan ini makin berkualitas dengan makin banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan pengungkapan perusahaan (Gunawan dan Hendrawati, 2016). Dalam hal ini proporsi komisaris independen memegang peran penting dalam perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen, sehingga dapat meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan.

Hasil penelitian Gunawan dan Hendrawati (2016) menemukan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Sedangkan penelitian Widjayanti dan Wahidawati (2015) menemukan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah :

H2: Diduga proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

Jumlah Anggota Dewan Komisaris Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS

Inti dari *corporate governance* Indonesia ada pada dewan komisaris karena tugas utama dewan komisaris adalah mengawasi dan mengevaluasi pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh dewan direksi serta memberi nasihat kepada dewan direksi. Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jumlah minimal anggota dewan komisaris adalah 1 orang. Penelitian Pitasari dan Septiani (2014) menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Sedangkan Sutiyok dan Rahmawati (2014) menemukan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah :
H3: Diduga jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

Jumlah Komite Audit Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS

Komite audit merupakan bagian integral dari *corporate governance* yang dibebani dengan tanggung jawab pelaporan keuangan. Dalam teori agensi mensyaratkan untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan untuk menghindari konflik diantara pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini anggota komite audit berperan untuk mengawasi manajemen agar mengungkapkan laporan keuangan secara lengkap dan jelas. Semakin banyak anggota komite audit maka semakin berkualitas pula laporan keuangan yang dihasilkan.

Hasil penelitian Pitasari dan Septiani (2014) menunjukkan bahwa jumlah komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Sedangkan Sutiyok dan Rahmawati (2014) menemukan bahwa jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah :

H4: Diduga jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

Jumlah Rapat Komite Audit Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS

Intensitas pertemuan rapat yang diadakan oleh komite audit diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Hal ini dilakukan agar komite audit dapat terus memonitoring kinerja manajemen untuk menghindari kecurangan dalam pengungkapan laporan keuangan. Semakin tinggi intensitas pertemuan yang diadakan oleh komite audit diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib.

Hasil penelitian Pitasari dan Septiani (2014) menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Sedangkan Fauziah (2015) menemukan bahwa jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah :

H5: Diduga jumlah rapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

Kepemilikan Manajerial Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS

Kepemilikan manajerial dianggap sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan perusahaan dalam melakukan transparansi dalam menyajikan laporan keuangan. Semakin besar kepemilikan manajerial maka manajemen akan semakin berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dalam memenuhi kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu pihak manajemen akan berusaha memaksimalkan kinerjanya sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan.

Hasil penelitian Widjayanti dan Wahidawati (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Sedangkan Gunawan dan Hendrawati (2016) menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah :

H6: Diduga kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

II. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan hotel, restoran dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018 yaitu sebanyak 25 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian adalah *purposive sampling* artinya sampel dipilih berdasarkan pertimbangan subjektif penelitian dimana persyaratan yang dibuat sebagai kriteria yang harus dipenuhi sebagai sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 10 perusahaan. Dengan kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan hotel, restoran dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2018.
2. Perusahaan hotel, restoran dan pariwisata yang mempublikasikan laporan tahunan (annual report) selama periode 2014-2018.
3. Perusahaan hotel, restoran dan pariwisata yang menyediakan data lengkap terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian.

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Identifikasi item pengungkapan dilakukan dengan

menggunakan checklist pengungkapan wajib yang diwajibkan berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK No. VIII.G.7 Nomor: KEP-347/BL/2012 yaitu sebanyak 73 item. Item-item yang dipilih dari ceklis ini disesuaikan dengan PSAK yang berlaku di Indonesia yang wajib diterapkan untuk perusahaan hotel, restoran dan pariwisata yang sudah konvergensi IFRS.

Pengungkapan wajib diukur dengan menggunakan teknik dikotomis, yakni jika item tersebut dapat diterapkan (*applicable*) dalam perusahaan dan diungkapkan diberi skor 1 dan jika tidak diungkapkan diberi skor 0 (Fitri, 2012). Tingkat kepatuhan konvergensi IFRS dalam penelitian ini diperoleh dengan membandingkan total klasifikasi item tingkat kepatuhan pengungkapan wajib perusahaan dengan jumlah seluruh kriteria item pengungkapan yang telah ditetapkan BAPEPAM-LK yang sudah konvergensi IFRS (Rahmawati dan Sutiyok, 2014). Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kepatuhan wajib konvergensi IFRS ini adalah:

$$PW = \frac{\text{Total Klasifikasi yang Diungkapkan}}{\text{Jumlah Item}} \times 100\%$$

Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2011) variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah :

1. Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Rapat dewan komisaris berfungsi sebagai media komunikasi formal anggota dewan komisaris dalam mengawasi proses *corporate governance* untuk memastikan bahwa manajemen membudayakan *corporate governance*. Jumlah rapat dewan komisaris ini diukur dengan jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam satu tahun (Suhardjanto, 2010). Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kepatuhan wajib konvergensi IFRS ini adalah:

$$JRDK = \Sigma \text{Rapat Dewan Komisaris Dalam 1 Tahun}$$

2. Proporsi Komisaris Independen

Tujuan menghadiri seorang komisaris independen adalah sebagai penyeimbang pengambilan keputusan dewan komisaris (Sutedi, 2012). Indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi komisaris independen ini adalah persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris (Widjayanti dan Wahidawati, 2015). Rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah rapat dewan komisaris ini adalah:

$$KOMIN = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris yang Dimiliki Perusahaan}} \times 100\%$$

3. Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Jumlah komisaris di perusahaan memainkan peran penting dalam pemantauan perusahaan dan dalam mengambil keputusan strategis. Jumlah anggota dewan komisaris adalah banyaknya anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Sutiyok dan Rahmawati, 2014). Rumus yang digunakan untuk menghitung proporsi komisaris independen ini adalah:

$$JADK = \Sigma \text{Anggota Dewan Komisaris Internal}$$

4. Jumlah Komite Audit

Jumlah komite audit di perusahaan memiliki peran penting dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan. Indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah komite audit adalah jumlah komite audit dalam suatu perusahaan (Priwandi *et.al*, 2012). Rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah anggota dewan komisaris ini adalah:

$$JKA = \Sigma \text{Anggota Komite Audit Internal}$$

5. Jumlah Rapat Komite Audit

Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab yang menyangkut sistem pelaporan keuangan, komite audit perlu mengadakan rapat tiga sampai empat kali dalam satu tahun (FCGI, 2001). Indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah rapat komite audit ini adalah jumlah rapat yang dilakukan oleh komite audit dalam satu tahun (Widjayanti dan Wahidawati, 2015). Rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah komite audit ini adalah:

$$JRKA = \Sigma \text{Rapat Komite Audit Dalam 1 Tahun}$$

6. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan kondisi dimana manajemen perusahaan memiliki rangkap jabatan yaitu sebagai manajemen perusahaan dan pemegang saham serta berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang ada di perusahaan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar (Suryani, 2010). Rumus yang digunakan untuk menghitung kepemilikan manajerial ini adalah:

$$KM = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Manajemen}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini dengan menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Pengujian dengan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25. Dalam persamaan analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$PW = \alpha + \beta_1 JRDK + \beta_2 KOMIN + \beta_3 JADK + \beta_4 JKA + \beta_5 JRKA + \beta_6 KM + e$$

Keterangan :

- PW = Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS
JRDK = Jumlah Rapat Dewan Komisaris
KOMIN = Proporsi Komisaris Independen
JADK = Jumlah Anggota Dewan Komisaris
JKA = Jumlah Komite Audit
JRKA = Jumlah Rapat Komite Audit
KMM = Kepemilikan Manajerial
e = *Errors Terms*
 α = Konstanta
 $\beta_1 - \beta_6$ = Koefisien Regresi

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif

Berdasarkan tahapan pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh hasil analisis statistik deskriptif, proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 25. Dari masing-masing variabel penelitian yang digunakan dapat dilihat hasil analisis statistik deskriptif dari tabel dibawah ini:

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PW	50	52,05	67,12	59,9686	3,77774
JRDK	50	2,00	48,00	11,6000	9,57463
KOMIN	50	25,00	66,67	39,4318	10,15134
JADK	50	2,00	6,00	3,7800	1,05540
JKA	50	2,00	3,00	2,9200	0,27405
JRKA	50	2,00	16,00	6,1400	3,98983
KM	50	0,09	48,67	11,8616	12,14116
Valid N (listwise)	50				

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah data yang masuk (N) dalam pengujian ini terdapat 50 data untuk semua variabel. Pada variabel tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS memiliki nilai minimum sebesar 52,05% pada PT. Hotel Sahid Jaya International, Tbk (SHID), dan maksimumnya sebesar 67,12% pada PT Indonesia Paradise Property, Tbk (INPP), dan PT MNC Land, Tbk (KPIG), dengan memiliki standar deviasi 3,78%. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan telah mengungkapkan sebanyak 59,97% item pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Dengan meningkatnya tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS maka dapat memberikan keuntungan bagi investor dan manajemen perusahaan.

Dari hasil statistik deskriptif pada tabel 1 dapat diketahui bahwa variabel mekanisme *corporate governance* menunjukkan perusahaan telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan, yaitu jumlah rapat dewan komisaris dan komite audit rata-rata telah mengadakan rapat secara rutin yaitu 6 sampai 11 kali pertemuan, proporsi komisaris independen rata-rata memiliki lebih dari 30%, jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah komite audit rata-rata telah memiliki 3 sampai 4 orang dan kepemilikan manajerial rata-rata telah memiliki 11,86%. Dengan demikian, perusahaan telah memenuhi peraturan yang telah dituangkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga perusahaan dapat memberikan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS yang lebih tinggi.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Hasil pengujian dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Karena signifikan lebih dari 0,05 ($0,200 > 0,05$), maka nilai residual tersebut telah normal. Sehingga uji normalitas data terpenuhi.

b. Uji multikolinearitas

Hasil pengujian multikolinearitas dapat diketahui bahwa semua nilai *tolerance* $> 0,10$ dan hasil perhitungan nilai *VIF* < 10 ini ditemukan tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang digunakan sebagai prediksi dalam penelitian ini bebas dari gejala multikolinearitas.

c. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot* dapat diketahui bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sebab tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat dikatakan uji heteroskedastisitas terpenuhi.

d. Uji autokorelasi

Hasil dari pengujian menunjukkan nilai dari *Durbin Watson* bahwa dari kriteria yang telah ditentukan *Durbin Watson* hitung berada -2 sampai +2 yakni 1,710 maka ini berarti tidak ada autokorelasi. Sehingga kesimpulannya adalah uji autokorelasi terpenuhi karena memenuhi syarat bebas.

3. Uji Hipotesis

a. Uji t (Uji Parsial)

Tabel 2
Hasil Uji Hipotesis

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	43,118	7,126		6,051	0,000
	JRDK	0,032	0,058	0,081	0,544	0,589
	KOMIN	-0,052	0,044	-0,138	-1,170	0,248
	JADK	2,481	0,432	0,693	5,749	0,000
	JKA	3,716	2,140	0,270	1,737	0,090
	JRKA	-0,115	0,177	-0,121	-0,648	0,520
	KM	-0,085	0,035	-0,274	-2,444	0,019

a. Dependent Variable: PW

Berdasarkan pengujian pada tabel 2 di atas, maka dapat dirumuskan hasil regresi sebagai berikut:

$$PW = 43,118 + 0,032 JRDK - 0,052 KOMIN + 2,481 JADK + 3,716 JKA - 0,115 JRKA - 0,085 KM + e$$

1. Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian terhadap regresi, didapatkan nilai koefisien regresi sebesar 0,032 dengan nilai signifikan sebesar 0,589 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

Jumlah rapat dewan komisaris perusahaan rata-rata tidak mempengaruhi persyaratan minimal untuk mengadakan pertemuan sebanyak dua belas kali dalam satu tahun. Namun, apabila dengan jumlah rapat yang kurang memenuhi ketentuan minimal dapat dilaksanakan secara efektif dan berkomunikasi baik dengan pihak manajemen maka tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS dapat meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Pitasari dan Septiani (2014) serta Widjayanti dan Wahidawati (2015) yang menyatakan jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Dan hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Sutyok dan Rahmawati (2014) yang menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

2. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian terhadap regresi, didapatkan nilai koefisien regresi sebesar -0,052 dengan nilai signifikan sebesar 0,248 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

Hasil hipotesis proporsi komisaris independen menunjukkan bahwa besarnya komisaris independen disuatu perusahaan tidak memiliki hubungan terhadap pengungkapan. Hal ini didasarkan pada masih minimnya perusahaan yang memiliki komisaris independen sehingga belum cukup tinggi untuk membuat komisaris independen tersebut mendominasi kebijakan yang diambil oleh dewan komisaris, sehingga jumlah komisaris independen disuatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Gunawan dan Hendrawati (2016) yang menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib IFRS. Dan hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Fauziah (2015) serta Widjayanti dan Wahidawati (2015) yang menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

3. Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Komisaris Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian terhadap regresi, didapatkan nilai koefisien regresi sebesar 2,481 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

Hasil hipotesis jumlah anggota dewan komisaris menunjukkan bahwa semakin besar dewan komisaris disuatu perusahaan akan meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan semakin berkualitas sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Serta semakin berfungsinya *corporate governance* dalam meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sutiyok dan Rahmawati (2014) serta Gunawan dan Hendrawati (2016) menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Dan hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Pitasari dan Septiani (2014) yang menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

4. Pengaruh Jumlah Komite Audit Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian terhadap regresi, didapatkan nilai koefisien regresi sebesar 3,716 dengan nilai signifikan sebesar 0,090 dengan tingkat

signifikansi sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

Hasil hipotesis jumlah komite audit menunjukkan bahwa jumlah komite audit perusahaan rata-rata tidak memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota komite audit. Sehingga keberadaan anggota komite audit tidak dapat berjalan secara efektif maka dalam pengambilan keputusan komite audit tidak berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh anggota komite audit. Sehingga jumlah komite audit disuatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sutiyok dan Rahmawati (2014) serta Widjayanti dan Wahidawati (2015) menunjukkan bahwa jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Dan hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Pitasari dan Septiani (2014) yang menunjukkan bahwa jumlah komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

5. Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian terhadap regresi, didapatkan nilai koefisien regresi sebesar -0,115 dengan nilai signifikan sebesar 0,520 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

Jumlah rapat komite audit dalam perusahaan hanya bersifat *mandatory* terhadap peraturan yang ada, terdapat kemungkinan bahwa rapat komite audit jarang dikordinasikan dan dikomunikasikan dengan pihak manajemen maupun auditor eksternal sehingga masalah-masalah yang terdapat dalam proses pelaporan keuangan tidak terungkap dan tidak diketahui oleh komite audit (Utami, dkk. 2012). Dalam hal ini maka jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Fauziah (2015) menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Dan hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Pitasari dan Septiani (2014) yang menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

6. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian terhadap regresi, didapatkan nilai koefisien regresi sebesar -0,085 dengan nilai signifikan sebesar 0,019 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

Hasil hipotesis kepemilikan manajerial menunjukkan bahwa kepemilikan saham yang dimiliki perusahaan memiliki insentif lebih besar untuk mengurangi kecurangan dalam laporan keuangan. Dengan adanya kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan maka

tingkat kepatuhan pengungkapan dalam laporan keuangan akan semakin tinggi. Hal ini juga disebabkan karena manajemen tidak hanya berperan sebagai pengelola perusahaan melainkan juga sebagai pemegang saham perusahaan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Fauziah (2015) serta Widjayanti dan Wahidawati (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Dan hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Gunawan dan Hendrawati (2016) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

b. Uji F (Uji Simultan)

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 dengan tingkat kesalahan yang digunakan 0,05. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai signifikan yang dihasilkan sebesar $0,000 < \alpha 0,05$ maka keputusannya adalah jumlah rapat dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah anggota dewan komisaris, jumlah komite audit, jumlah rapat komite audit, dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutiyok dan Rahmawati (2014), serta Fauziah (2015) yang menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

c. Uji Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi yang dihasilkan dalam pengujian *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,429. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel jumlah rapat dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah anggota dewan komisaris, jumlah komite audit, jumlah rapat komite audit, dan kepemilikan manajerial mampu memberikan kontribusi dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS sebesar 42,9% sedangkan sisanya 57,1% lagi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis dengan pembahasan hasil pengujian hipotesis maka dapat diajukan beberapa kesimpulan tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS yang merupakan hasil jawaban dari masalah yang dibahas didalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.
2. Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.
3. Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.
4. Jumlah komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.
5. Jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.
6. Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.
7. Jumlah rapat dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah anggota dewan komisaris, jumlah komite audit, jumlah rapat komite audit, dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS.

Keterbatasan Penelitian

Sesuai dengan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat diajukan sejumlah keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini hanya menganalisis variabel independen mekanisme *corporate governance* internal yang mana masih terdapat sejumlah variabel lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS, yaitu mekanisme *corporate governance* eksternal seperti kepemilikan institusional dan kepemilikan asing, serta variabel kontrol seperti ukuran perusahaan.
2. Tidak semua perusahaan hotel, restoran dan pariwisata yang mengungkapkan data secara lengkap selama periode 2014-2018 sehingga menyebabkan banyak pengurangan sampel perusahaan dalam penelitian.

Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang berkualitas lagi dimasa mendatang dengan adanya beberapa masukan mengenai beberapa hal diantaranya:

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS, sebab masih banyak variabel lain yang belum termasuk dalam penelitian ini yaitu mekanisme *corporate governance* eksternal seperti kepemilikan institusional dan kepemilikan asing serta variabel kontrol seperti ukuran perusahaan.
2. Peneliti selanjutnya, diharapkan meneliti perusahaan lain selain perusahaan hotel, restoran, dan pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPEPAM. 2012. Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang Konvergen dengan IFRS, Kep-347/BL/2012.
- Deloitte. 2019. "Use of IRFS". <http://www.iasplus.com>. Diakses 02 April 2019 (16.46).
- Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan. 2014. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan. 2015. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Fauziah, Isna. 2015. "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Pasca Konvergensi IFRS". *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 1-26.
- Fitri, Yuriana,. 2012. "Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Tahunan". *Jurnal Ilmiah*. Universitas Negeri Padang.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). 2001. Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance.
- Ghozali dan Chariri, 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, Barbara, dan Eka Riana Hendrawati. 2016. "Peran Struktur Corporate Governance dalam Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib periode setelah Konvergensi IFRS (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)". *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol.1 No.1 : 71-83.
- Lins, K.V., dan F.E. Warnock. 2004. *Corporate Governance and the Shareholder Base*. International Finance Discussion Papers (816).
- Pitasari, A. & Septiani, A. 2014. "Analisis Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Konvergensi IFRS pada Laporan Laba Rugi Komprehensif". *Diponegoro Journal of Accounting* 3(02) : 1-9.
- Priwandi,W., D. Suhardjanto dan Triatmoko. 2012. "Peran Struktur Corporate Governance Dalam Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure". *Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto.

- Rini, A. K. 2010. “Analisis Luas Pengungkapan Corporate Governance dalam Laporan tahunan pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.*Skripsi*. Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Suhardjanto, Djoko dan Erna Rahmawati. 2012. “Peran Board of Directors dalam Operational Risk Disclosure” *Jurnal*. Universitas Sebelas Maret Surakarta Trikonomika. Vol 11 No. 1 Juni 2012. Hal 1-14.
- Suhardjanto. 2010. “Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan dan Environmental Disclosure”. *Jurnal Akuntansi* 6 (1): 46.
- Sulasmiyati, Dkk. 2016. “Pengaruh Struktur Modal, Struktur Kepemilikan Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2014”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 35, No. 1, Juni, Hal. 154-164.
- Suryani. 2010. “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI”. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Good Corporate Governance*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sutiyok dan Evi Rahmawati. 2014. “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS di Perbankan”. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 15 (2): 152-162.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: PBF.
- Utami, W. D., Suhardjanto, D., S. Hartoko. 2012. “Investigasi Dalam Konvergensi IFRS di Indonesia: Tingkat Kepatuhan Pengungkapan dan Kaitannya dengan Mekanisme Corporate Governance”. *Simposium Nasional Akuntansi XV*: 1-28.
- Walsh, J. P., dan Seward, J. K., 1990. “On the Efficiency of Internal and External Corporate Governance Control Mechanisms”. *Jurnal*. *Academy of Management Review*, Vol. 15, No. 3, hal. 421-458.
- Widjayanti, Septri Ari & Wahidawati. 2015. “Pengaruh Struktur dan Mekanisme Corporate Governance Pada Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* : 1-21